



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bima.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BDPRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap desa.

- (4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (4) Besar BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran BDPRD setiap desa disalurkan oleh daerah kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BDPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. bagian desa dari pajak daerah disalurkan pada bulan Mei pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. bagian desa dari retribusi daerah disalurkan pada bulan Oktober pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan BDPRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Penggunaan BDPRD dapat dilakukan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa setelah prioritas penggunaan BDPRD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan BDPRD yang dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Jenis kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang tidak terduga akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.

BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan BDPRD setiap semester kepada Bupati dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan BDPRD semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana PRD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


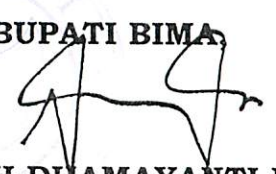
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 17-2 2017


BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 17-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


H.M. TAUFIK HAK

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
I	MONTA				
1	Tolotangga	10,396,891.30	9,445,333.57	19,842,224.87	
2	Sondo	10,396,891.30	4,591,524.08	14,988,415.38	
3	Simpasai	10,396,891.30	7,838,663.17	18,235,554.47	
4	Sie	10,396,891.30	18,266,621.56	28,663,512.86	
5	Tangga	10,396,891.30	8,758,775.34	19,155,666.64	
6	Monta	10,396,891.30	8,889,747.56	19,286,638.86	
7	Sakuru	10,396,891.30	13,902,499.37	24,299,390.67	
8	Baralau	10,396,891.30	5,587,190.22	15,984,081.52	
9	Tolouwi	10,396,891.30	4,547,606.14	14,944,497.44	
10	Wilamaci	10,396,891.30	715,773.15	11,112,664.45	
11	Pela	10,396,891.30	6,665,802.53	17,062,693.83	
12	Tangga Baru	10,396,891.30	2,354,754.93	12,751,646.23	
13	Nontotera	10,396,891.30	1,826,042.51	12,222,933.81	
14	Waro	10,396,891.30	926,023.66	11,322,914.96	
		145,556,478.21	94,316,357.78	239,872,835.99	
II	BOLO				
1	Tambe	10,396,891.30	8,612,148.78	19,009,040.08	
2	Rasabou	10,396,891.30	7,354,689.23	17,751,580.53	
3	Rato	10,396,891.30	31,563,942.15	41,960,833.45	
4	Kananga	10,396,891.30	14,864,861.95	25,261,753.25	
5	L e u	10,396,891.30	14,435,833.31	24,832,724.61	
6	Timu	10,396,891.30	12,172,347.43	22,569,238.73	
7	Bontokape	10,396,891.30	10,012,600.88	20,409,492.18	
8	Sondosia	10,396,891.30	13,137,948.14	23,534,839.45	
9	Nggembe	10,396,891.30	5,463,489.14	15,860,380.44	
10	Sanolo	10,396,891.30	4,203,399.84	14,600,291.14	
11	Tumpu	10,396,891.30	4,228,061.74	14,624,953.04	
12	Rada	10,396,891.30	4,363,078.62	14,759,969.92	
13	Kara	10,396,891.30	1,168,925.36	11,565,816.66	
14	Darussalam	10,396,891.30	1,324,148.04	11,721,039.34	
		145,556,478.21	132,905,474.60	278,461,952.81	
III	WOHA				
1	Keli	10,396,891.30	8,513,763.14	18,910,654.44	
2	Tenga	10,396,891.30	6,616,003.46	17,012,894.76	
3	Tente	10,396,891.30	13,733,711.44	24,130,602.74	
4	Rabakodo	10,396,891.30	9,618,904.18	20,015,795.48	
5	Samili	10,396,891.30	5,440,674.60	15,837,565.90	
6	Kalampa	10,396,891.30	10,166,007.73	20,562,899.03	
7	Risa	10,396,891.30	11,906,830.49	22,303,721.79	
8	Pandai	10,396,891.30	14,805,307.57	25,202,198.87	
9	Donggobolo	10,396,891.30	13,096,187.41	23,493,078.71	
10	Dadibou	10,396,891.30	13,355,981.64	23,752,872.94	
11	Talabiu	10,396,891.30	13,998,725.08	24,395,616.38	
12	Naru	10,396,891.30	7,588,797.85	17,985,689.15	
13	Nisa	10,396,891.30	5,270,484.99	15,667,376.29	
14	Waduwani	10,396,891.30	2,586,207.32	12,983,098.62	
15	Penapali	10,396,891.30	13,436,399.26	23,833,290.56	
		155,953,369.51	150,133,986.15	306,087,355.66	
IV	BELO				
1	Ncera	10,396,891.30	2,101,129.87	12,498,021.17	
2	Lido	10,396,891.30	3,739,402.04	14,136,293.35	
3	Ngali	10,396,891.30	2,865,359.97	13,262,251.27	
4	Renda	10,396,891.30	2,648,628.89	13,045,520.19	
5	Cenggu	10,396,891.30	6,812,371.09	17,209,262.39	
6	Runggu	10,396,891.30	3,583,096.87	13,979,988.17	
7	Soki	10,396,891.30	609,756.72	11,006,648.02	
8	Roka	10,396,891.30	1,622,933.13	12,019,824.43	
9	Diha	10,396,891.30	0.00	10,396,891.30	
		93,572,021.70	23,982,678.56	117,554,700.27	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
V	WAWO				
1	Tarlawi	10,396,891.30	2,331,558.15	12,728,449.45	
2	Ntori	10,396,891.30	9,945,024.52	20,341,915.82	
3	Muria	10,396,891.30	9,921,234.14	20,318,125.44	
4	Pesa	10,396,891.30	9,279,785.72	19,676,677.03	
5	Raba	10,396,891.30	12,492,365.93	22,889,257.23	
6	Kambilo	10,396,891.30	13,910,364.88	24,307,256.18	
7	Maria Utara	10,396,891.30	10,359,533.47	20,756,424.77	
8	Kombo	10,396,891.30	7,130,397.82	17,527,289.12	
9	Riamau	10,396,891.30	1,865,056.72	12,261,948.02	
		93,572,021.70	77,235,321.35	170,807,343.05	
VI	SAPE				
1	Sari	10,396,891.30	19,169,265.89	29,566,157.19	
2	Boke	10,396,891.30	6,479,368.87	16,876,260.17	
3	Jia	10,396,891.50	11,094,284.35	21,491,175.65	
4	Bugis	10,396,891.30	19,645,190.59	30,042,081.89	
5	Naru	10,396,891.30	14,987,377.39	25,384,268.69	
6	Rasabou	10,396,891.30	11,734,240.00	22,131,131.30	
7	Sangia	10,396,891.30	11,441,784.84	21,838,676.14	
8	Nac	10,396,891.30	9,782,585.98	20,179,477.28	
9	Rui Oi	10,396,891.30	10,829,047.66	21,225,938.96	
10	Parangina	10,396,891.30	12,992,532.92	23,389,424.23	
11	Kowo	10,396,891.30	11,351,241.36	21,748,132.66	
12	Buncu	10,396,891.30	4,838,280.49	15,235,171.79	
13	Poin	10,396,891.30	8,597,299.41	18,994,190.71	
14	Bajo Pulo	10,396,891.30	1,243,473.13	11,640,364.43	
15	Naru Barat	10,396,891.30	6,340,368.83	16,737,260.13	
16	Tanah Putih	10,396,891.30	4,890,716.32	15,287,607.62	
17	Lamere	10,396,891.30	1,189,312.55	11,586,203.85	
18	Oi Maci	10,396,891.30	6,022,214.43	16,419,105.73	
		187,144,043.41	172,628,584.98	359,772,628.39	
VII	WERA				
1	Ntoke	10,396,891.30	7,395,118.75	17,792,010.05	
2	Pai	10,396,891.30	3,615,743.00	14,012,634.30	
3	Nunggi	10,396,891.30	6,880,141.69	17,277,032.99	
4	Tawali	10,396,891.30	5,751,355.07	16,148,246.37	
5	Hidirasa	10,396,891.30	5,422,745.11	15,819,636.41	
6	Wora	10,396,891.30	5,542,449.02	15,939,340.32	
7	Sangiang	10,396,891.30	2,449,557.94	12,846,449.24	
8	Bala	10,396,891.30	2,302,787.36	12,699,678.66	
9	Oi Tui	10,396,891.30	8,378,212.22	18,775,103.52	
10	Tadewa	10,396,891.30	2,747,778.23	13,144,669.53	
11	Nanga Wera	10,396,891.30	5,009,417.14	15,406,308.44	
12	Rangasolo	10,396,891.30	2,345,358.51	12,742,249.81	
13	Kulajena	10,396,891.30	6,443,363.93	16,840,255.23	
14	Mandala	10,396,891.30	4,632,652.68	15,029,543.98	
		145,556,478.21	68,916,680.63	214,473,158.84	
VIII	DONGGO				
1	Doridungga	10,396,891.30	4,497,807.84	14,894,699.14	
2	Kala	10,396,891.30	2,987,219.13	13,384,110.44	
3	O'o	10,396,891.30	5,699,572.79	16,096,464.09	
4	Mbawa	10,396,891.30	7,150,464.27	17,547,355.57	
5	Palama	10,396,891.30	2,872,641.61	13,269,532.91	
6	Rora	10,396,891.30	3,573,860.82	13,970,752.12	
7	Mpili	10,396,891.30	4,476,338.55	14,873,229.85	
8	Bumi Pajo	10,396,891.30	4,541,247.40	14,938,138.70	
9	Ndano NaE	10,396,891.30	2,818,536.30	13,215,427.60	
		93,572,021.70	38,617,688.70	132,189,710.40	
IX	SANGGAR				
1	Piong	10,396,891.30	11,538,046.75	21,934,938.05	
2	Boro	10,396,891.30	12,324,145.52	22,721,036.82	
3	Kore	10,396,891.30	14,147,973.60	24,544,864.90	
4	Taloko	10,396,891.30	5,186,165.17	15,583,056.47	
5	Oi Saro	10,396,891.30	6,468,141.82	16,865,033.12	
6	Sanduc	10,396,891.30	5,666,902.13	16,063,793.43	
		62,381,347.80	55,331,375.00	117,712,722.80	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
X	AMBALAWI				
1	Nipa	10,396,891.30	14,179,497.93	24,576,389.23	
2	Tolowata	10,396,891.30	7,257,025.65	17,653,916.95	
3	Rite	10,396,891.30	9,903,826.24	20,300,717.54	
4	Mawu	10,396,891.30	12,316,521.34	22,713,412.64	
5	Talapiti	10,396,891.30	5,248,640.46	15,645,531.76	
6	Kole	10,396,891.30	2,774,162.16	13,171,053.46	
		62,381,347.80	51,679,673.77	114,061,021.57	
XI	LANGGUDU				
1	Waworada	10,396,891.30	10,794,158.69	21,191,049.99	
2	Karumbu	10,396,891.30	15,322,237.87	25,719,129.17	
3	Rupe	10,396,891.30	22,645,362.69	33,042,253.99	
4	Kalodu	10,396,891.30	1,327,170.54	11,724,061.84	
5	Kawuwu	10,396,891.30	5,798,303.69	16,195,194.99	
6	Doro O'o	10,396,891.30	13,122,828.24	23,519,719.54	
7	Laju	10,396,891.30	8,935,901.72	19,332,793.02	
8	Kangga	10,396,891.30	9,574,371.23	19,971,262.53	
9	Karampi	10,396,891.30	12,436,293.76	22,833,185.06	
10	Waduruka	10,396,891.30	3,216,403.78	13,613,295.08	
11	Dumu	10,396,891.30	4,554,187.91	14,951,079.21	
12	Rompo	10,396,891.30	5,559,824.22	15,956,715.52	
13	Sarac Ruma	10,396,891.30	6,237,690.18	16,634,581.48	
14	Pusu	10,396,891.30	3,783,012.87	14,179,904.17	
15	Sambanc	10,396,891.30	4,007,547.96	14,404,439.26	
		155,953,369.51	127,315,295.35	283,268,664.86	
XII	LAMBU				
1	Kalco	10,396,891.30	4,778,253.57	15,175,144.87	
2	Simpasai	10,396,891.30	12,100,320.41	22,497,211.71	
3	Mangge	10,396,891.30	756,291.80	11,153,183.10	
4	Lanta	10,396,891.30	11,431,093.01	21,827,984.31	
5	Nggelu	10,396,891.30	1,879,564.34	12,276,455.64	
6	Rato	10,396,891.30	9,490,126.15	19,887,017.45	
7	Sumi	10,396,891.30	28,683,913.03	39,080,804.33	
8	Soro	10,396,891.30	10,686,427.23	21,083,318.54	
9	Lambu	10,396,891.30	2,857,450.86	13,254,342.16	
10	Hidirasa	10,396,891.30	1,892,058.39	12,288,949.69	
11	Lanta Barat	10,396,891.30	5,584,205.09	15,981,096.39	
12	Melayu	10,396,891.30	4,282,320.41	14,679,211.71	
13	Sangga	10,396,891.30	4,999,755.64	15,396,646.94	
14	Monta Baru	10,396,891.30	5,093,258.18	15,490,149.48	
		145,556,478.21	104,515,038.11	250,071,516.32	
XIII	MADAPANGGA				
1	Woro	10,396,891.30	2,429,885.40	12,826,776.70	
2	Campa	10,396,891.30	5,861,342.60	16,258,233.90	
3	Mpuri	10,396,891.30	6,946,578.72	17,343,470.02	
4	Ndano	10,396,891.30	2,400,239.98	12,797,131.28	
5	Monggo	10,396,891.30	8,368,640.64	18,765,531.94	
6	Dena	10,396,891.30	11,611,445.47	22,008,336.77	
7	Rade	10,396,891.30	10,005,626.74	20,402,518.04	
8	Tonda	10,396,891.30	6,619,242.77	17,016,134.07	
9	Bolo	10,396,891.30	9,240,215.28	19,637,106.58	
10	Mada Wau	10,396,891.30	4,211,372.78	14,608,264.08	
11	Ncandi	10,396,891.30	3,301,189.13	13,698,080.43	
		114,365,804.31	70,995,779.52	185,361,583.82	
XIV	TAMBORA				
1	Labuan Kananga	10,396,891.30	6,563,721.38	16,960,612.68	
2	Kawinda Nae	10,396,891.30	3,923,392.40	14,320,283.70	
3	Kawinda Toi	10,396,891.30	3,323,456.00	13,720,347.30	
4	Oi Panihi	10,396,891.30	514,545.38	10,911,436.69	
5	Oi Bura	10,396,891.30	3,453,144.87	13,850,036.17	
6	Oi Katupa	10,396,891.30	0.00	10,396,891.30	
7	Rasabou	10,396,891.30	817,418.34	11,214,309.64	
		72,778,239.10	18,595,678.37	91,373,917.48	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
	XV SOROMANDI				
1	Bajo	10,396,891.30	1,721,182.53	12,118,073.83	
2	Punti	10,396,891.30	3,131,578.33	13,528,469.63	
3	Wadu Kopa	10,396,891.30	1,841,226.64	12,238,117.94	
4	Kananta	10,396,891.30	4,889,343.83	15,286,235.13	
5	Sai	10,396,891.30	5,673,377.64	16,070,268.94	
6	Sampungu	10,396,891.30	1,849,905.68	12,246,796.98	
7	Lewintana	10,396,891.30	2,247,868.91	12,644,760.21	
		72,778,239.10	21,354,483.58	94,132,722.68	
	XVI PARADO				
1	Parado Wane	10,396,891.30	4,959,812.69	15,356,703.99	
2	Parado Rato	10,396,891.30	8,432,025.20	18,828,916.50	
3	Kuta	10,396,891.30	4,042,020.82	14,438,912.13	
4	Kanca	10,396,891.30	3,321,898.62	13,718,789.92	
5	Lere	10,396,891.30	1,537,669.78	11,934,561.08	
		51,984,456.50	22,293,427.12	74,277,883.62	
	XVII LAMBITU				
1	Kaboro	10,396,891.30	5,214,743.67	15,611,634.97	
2	Kuta	10,396,891.30	3,263,548.18	13,660,439.48	
3	Sambori	10,396,891.30	3,993,481.36	14,390,372.66	
4	Teta	10,396,891.30	3,142,866.10	13,539,757.40	
5	Kaowa	10,396,891.30	1,609,764.91	12,006,656.21	
6	Londu	10,396,891.30	1,018,045.89	11,414,937.19	
		62,381,347.80	18,242,450.11	80,623,797.91	
	XVIII PALIBELO				
1	Panda	10,396,891.30	12,961,713.53	23,358,604.83	
2	Belo	10,396,891.30	15,321,520.88	25,718,412.18	
3	Tonggondoa	10,396,891.30	5,034,369.81	15,431,261.11	
4	Tonggorisa	10,396,891.30	5,062,111.43	15,459,002.73	
5	Teke	10,396,891.30	4,924,188.43	15,321,079.73	
6	Ntonggu	10,396,891.30	7,227,813.06	17,624,704.36	
7	Nata	10,396,891.30	6,515,297.13	16,912,188.43	
8	Dore	10,396,891.30	1,753,802.19	12,150,693.50	
9	Roi	10,396,891.30	6,144,711.57	16,541,602.87	
10	Ragi	10,396,891.30	1,785,845.38	12,182,736.68	
11	Padolo	10,396,891.30	4,197,654.16	14,594,545.46	
12	Bre	10,396,891.30	3,881,824.35	14,278,715.65	
		124,762,695.61	74,810,851.92	199,573,547.53	
		1,985,806,238.40	1,323,870,825.60	3,309,677,064.00	

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI

9

7